

BAB II

PAJAK KOS

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Zuraida dan Advianto, 2011 : 1), dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Ilyas, 2010 : 6), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 5(lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu (Ilyas, 2010 : 7) :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) ang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungut pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

2.1.1. Pembagian Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut (Mardiasmo, 2009 : 5),

1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi 2(dua) kelompok, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi lagi menjadi 2(dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut, (Mardiasmo, 2009 : 7) :

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri

- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun tujuan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah (Suandy, 2011 : 22) :

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

2.2.1. Jenis Pajak Daerah dan Tarif Pajak

No.	Pajak Daerah Provinsi	Tarif Tertinggi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4	Pajak Air Permukaan	10%
5	Pajak Rokok	10%
	Pajak Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	35%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Sarang Burung Walet	10%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,3%
10	Pajak Air Tanah	20%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%

Selain tarif pajak yang telah ditetapkan diatas, Peraturan Daerah juga menetapkan kriteria jenis pajak kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

2.2.2. Cara Perhitungan Pajak Daerah

Pajak daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak Daerah}$$

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment* (Suandy, 2011 : 231).

1. Sistem *official assessment*

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Sistem *self assessment*

Pada sistem *self assessment* ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD.

2.3. Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel mengartikan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.1. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

2.3.2. Masa Pajak dan Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak

tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD.

Apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
2. Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
3. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk

SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

2.3.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.5. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
5. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
2. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Jika wajib pajak menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima dan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24(dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDB.

Jika dalam hal keberatan atau mengajukan permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif

berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Jika dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

2.3.6. Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

2.4. Pemondokan

Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan kamar atau rumah untuk di tempati sementara sebagai tempat tinggal.

Pemondokan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran
2. Bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran
3. Dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Pengecualian dari pemondokan adalah:

1. Satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga /keluarga
2. Hotel
3. Pondok wisata
4. Apartemen
5. Rumah susun

6. Asrama untuk kegiatan sosial, asrama untuk kepentingan keagamaan, asrama milik lembaga pendidikan, dan asrama TNI-POLRI.

2.4.1. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian usaha dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.

Tujuan pengaturan pemondokan sebagai berikut:

1. Mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur
2. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat
3. Penataan dan pengendalian kependudukan
4. Menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
5. Menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan.

2.4.2. Izin Penyelenggaraan Pemondokan

Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemondokan wajib memiliki izin penyelenggaraan pemondokan. Izin penyelenggaraan pemondokan diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin penyelenggaraan pemondokan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemondokan
2. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan
3. Bukti pemenuhan perizinan pendirian pemondokan.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pemondokan.

2.4.3. Hak, Kewajiban, dan Larangan

Hak penanggung jawab pemondokan adalah sebagai berikut :

1. Setiap penanggung jawab pemondokan berhak untuk melakukan penyelenggaraan pemondokan sesuai dengan izin yang diperoleh.
2. Setiap pemondok berhak untuk mendapatkan fasilitas pemondokan sesuai dengan kesepakatan antara pemondok dan penanggung jawab pemondokan.
3. Masyarakat mempunyai hak berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing. Peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan dilakukan melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dukuh.

Setiap penanggungjawab pemondokan wajib :

1. Bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam pemondokan

2. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan diketahui Dukuh setiap 3 (tiga) bulan.
3. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemondok
4. Turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan
5. Mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan
6. Memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila ada tamu yang menginap
7. Membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat, dan kepatutan
8. Memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
9. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Setiap pemondok wajib :

1. Menaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan
2. Berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
3. Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam pemondokan

5. Menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat
6. Turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan
7. Mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psitropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol dipemondokan; memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan
8. Melaporkan bila ada tamu yang menginap selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada ketua Rukun Tetangga setempat.

Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi. Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin diperuntukkan bagi pasangan suami istri dengan menunjukan akta nikah.

2.4.4. Sanksi

1. Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan diberikan peringatan secara tertulis apabila:

- a. Melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya
- b. Tidak memenuhi kewajiban pemondokan

- c. Tidak mematuhi larangan pemondokan yaitu menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.

Peringatan tertulis akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Izin penyelenggaraan pemondokan dicabut apabila:

- a. Ada permohonan dari pemilik izin
- b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan
- c. Pemilik izin tidak mengindahkan peringatan tertulis

Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan pemondokan.

2. Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemondokan tanpa izin diberi peringatan secara tertulis. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu. Apabila peringatan tidak dihiraukan maka akan ditindak lanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan pemondokan ditutup apabila penanggung jawab pemondokan tidak memenuhi ketentuan izin penyelenggaraan pemondokan setelah mendapatkan peringatan tertulis .

3. Sanksi Bagi Pemondok

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban pemondokan, maka Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh setempat memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepada pemondok. Apabila telah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tetap tidak diindahkan dan tetap melakukan pelanggaran maka Dukuh memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pemondokan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat padukuhan.

2.4.5. Ketentuan Pidana

Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.5. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman adalah suatu proses untuk mengerti tentang suatu hal. Adapun indikator-indikator tingkat pemahaman adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjawab pertanyaan yang sifatnya berusaha mencari tahu.
2. Mampu menjelaskan lebih mendalam tentang sesuatu yang berhubungan dengan pesan

3. Mampu memberikan pemikiran dan penghargaan terhadap makna.

2.6. Pengertian Usaha Kos

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.

2.7. Teori Kepatuhan

Menurut Norman D. Nowak, Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan formal

Merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.8. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa studi terdahulu yang meneliti mengenai pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak penghasilan. Beberapa diantaranya adalah Penelitian Novianti (2007) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* belum biasa diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi terutama pemilik usaha kos-kosan karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilan di SPT. Penelitian Indah (2008) menemukan bahwa para pemilik kos tidak paham dengan peraturan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Salah satu penyebabnya karena pemilik kos tidak paham dengan peraturan pajak penghasilan yang ada.